



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN TRIWULAN III

TAHUN 2025



**Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa patut kita panjatkan, atas terselesaikannya Laporan Triwulan III Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Melalui Laporan Triwulan III ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan evaluasi bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan kinerja di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Kupang, Oktober 2025

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197103291999031002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi Biro Organisasi.....	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Sistematika Penyajian.....	3
BAB II PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	4
2.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	4
2.2. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2025	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA SEMESTER I.....	10
3.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025	10
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10
Bagian Tatalaksana.....	18
Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas.....	28
3.2. Realisasi Anggaran.....	33
3.3. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja.....	35
BAB IV. PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu unsur staf penyusun Kebijakan Daerah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administrasi umum di Bidang Organisasi yang bertugas membantu Gubernur dan menyusun kebijakan organisasi daerah dibidang administrasi umum.

Untuk merealisasi tugas dan fungsi tersebut, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama tahun anggaran 2025 telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Biro Organisasi sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025, maka disusunlah Laporan Triwulan III Tahun 2025. Laporan Triwulan III ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan ini diharapkan menjadi informasi mengenai Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas pada Laporan Tahunan. Peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

1.2 Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

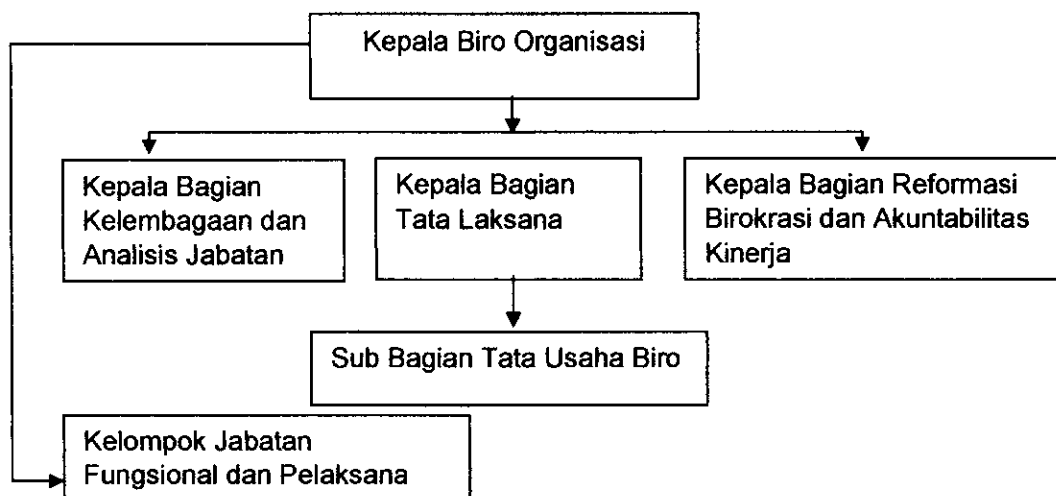
1.3 Struktur Organisasi

Struktur Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3. Kepala Bagian Tata Laksana
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



1.4 Sistematika Penyajian

Laporan Triwulan III secara umum menginformasikan capaian pelaksanaan Program Kegiatan dan Subkegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan III Tahun 2025. Membandingkan antara realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dengan rencana kerja sebagai tolak ukur keberhasilan, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan.

Sistematika penyajian Laporan Triwulan III Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan struktur organisasi serta sistematika penyajian
- Bab II Perencanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2025
- Bab III Akuntabilitas Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan, menggambarkan rencana kerja tahun 2025 dan realisasi kegiatan Triwulan III Tahun 2025.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Triwulan III Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 dan menguraikan rencana tindaklanjut yang perlukan bagi perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Laporan Tahunan.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

2.1 Rencana Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Realisasi Anggaran Biro Organisasi

Pada Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Biro Organisasi memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja pada Tahun 2025 pada Biro Organisasi meliputi program sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Rp. 582.249.897,-
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 214.769.697,-
 - 1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 18.343.000,-
 - 1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 27.315.700,-
 - 1.3 Subkegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 169.110.997,-
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 228.037.800,-
 - 2.1 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 40.183.300,-
 - 2.2 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,-
 - 2.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp. 40.451.500,-

- 2.4 Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 35.964.000,-
- 2.5 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 109.039.000,-
- 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp 34.200.000,-
 - 3.1 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 34.200.000,-
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 63.460.400,-
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.400,-
 - 4.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 3.780.000,-
 - 4.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 55.680.000,-
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 55.947.800,-
 - 5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 26.592.800,-
 - 5.2 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 29.355.000,-
- 6. Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 6.1 Subkegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- II Program Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp 1.088.570.202,-
 - 1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 472.825,800,-
 - 2.1 Subkegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 259.211.500,-
 - 2.2 Subkegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 22.281.000,-

2.3 Subkegiatan Penataan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 191.333.300,-

2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 615.744.402,-

2.1 Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 92.458.504,-

2.2 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Aknutabilitas Kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 223.629.700,-

2.3 Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 5.600.000,-

2.4 Subkegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 141.583.198,-

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Maka setiap tahun setiap pimpinan perangkat daerah sesuai arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menandatangani perjanjian kinerja. Perjanjian Kepala Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rincian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tabel 2.2

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI				FORMULA INDIKATOR
				AWAL 2023	2024	2025	2026	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tata laksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	39,39	45,45	51,51	57,57	Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" Total Jumlah PD Lingkup Provinsi $\text{X } 100\%$
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional prosedur;	40,67	45	47	49	Kemungkinan Organisasi = $\frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$

		e. pendidikan dan pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko; i. pengukuran kinerja; j. pengembangan inovasi layanan; dan k. budaya organisasi.				
Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	2,81 (cukup)	2,85 (cukup)	3,1 (baik)	3,2 (baik)	Total Nilai 6 Komponen Standar Pelayanan x 0,75 + Hasil Penilaian Masyarakat melalui F03 x 0,25
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah).	0	15,15	30,30	45,45	$\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$

	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur.	6	12	18	24	Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan) _____ X 100 % Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT Jumlah PD yang

B. Pelaksanaan Anggaran

1)	APBD	Uraian	Alokasi	Keterangan
	a) Belanja (Program)		Rp	Realisasi minimal 85%
1	Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 537.249897,-	Realisasi minimal 90%
2	Penataan Organisasi		Rp. 1.063.570.202,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan		Rp. -	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan triwulan III adalah pengukuran realisasi program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai. Pengukuran tersebut dimaksud sebagai hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

I. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan P-DPA Unit Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025. Realisasi sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
A.	Kelembagaan			
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penilaian Tingkat Kematanganan PD Provinsi NTT di Biro Organisasi Kemendagri di Jakarta	Biro Organisasi Provinsi NTT melakukan kegiatan Penilaian Tingkat Kematanganan PD di lingkungan Provinsi NTT untuk tahun periode 2023-2025	Dalam melakukan Penilaian Tingkat Kematanganan Perangkat Daerah terdapat beberapa kendala terkait dengan keterlambatan beberapa perangkat daerah dalam menyampaikan bukti dukung:	Telah disampaikan surat penguasaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang belum menyampaikan bukti dukung berkaitan dengan penilaian tingkat kematanganan perangkat

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
2	Rapat Penjelasan Instrumen Penilaian Tingkat Kematangan PD Lingkup Pemprov NTT bertempat di ruang rapat Asisten Setda Prov. NTT	PD mendapat penjelasan dan melakukan pengisian instrumen Penilaian Tingkat Kematangan PD Prov NTT serta menyiapkan data dukung pada Variabel sesuai tingkatan masing-masing.	Kebijakan terkait dengan tidak merubah kelembagaan Perangkat Daerah mengakibatkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penataan kelembagaan PD dan penyusunan uraian tugas Perangkat Daerah mengalami penundaan;	Melakukan konsultasi dengan Sekretaris Daerah sebagai Kepala Perangkat Daerah untuk dapat menggeser anggaran penataan kelembagaan PD agar dapat diserap ketersediaan anggaran tersebut;
3	Membuat SK Tim Penilaian Tingkat Kematangan PD Provinsi NTT	Tim Penilaian Tingkat Kematangan PD bertugas untuk validasi data yang di kirim oleh PD melalui link yang di lampirkan pada surat ke PD.	Perubahan regulasi yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan untuk seluruh Perangkat Daerah yang harus menyesuaikan dengan SOTK terbaru;	Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
				Pemerintah kepada seluruh perangkat daerah.
4	Melakukan kegiatan Desk Penilaian Tingkat Kematanganan tahap 1, 2 dan 3 untuk validasi data dukung dengan PD lingkup Pemprov NTT sesuai jadwal terlampir	Hasil Penilaian Tingkat Kematanganan PD Pemprov NTT mendapat nilai rata-rata sementara 30,64 (kategori sedang). untuk tindak lanjutnya akan dilakukan Desk Finalisasi.	Penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana yang barus sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Mengupayakan Pendampingan kepada masing-masing Perangkat Daerah sampai pada tingkatan UPTD, Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB, dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelesaian penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
5	Melakukan Pengumpulan Data Penilaian Tingkat Kematanganan PD Prov NTT	Penjelasan lanjutan terhadap pengisian instrument Penilaian Tingkat Kematanganan PD Provinsi NTT	Keterbatasan Anggaran mengakibatkan beberapa pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Tidak semua kegiatan yang dapat dilaksanakan bersamaan.	Mengupayakan Pendampingan secara bertahap bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan evaluasi jabatan.
6	Melakukan Finalisasi Data Penilaian Tingkat Kematanganan PD Prov NTT	Tindak lanjut hasil Desk Penilaian PD Provinsi NTT	Penambahan formasi CPNS dan PPPK yang mempengaruhi	Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
			komposisi bezeiting pegawai; Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan juga bergantung pada komitmen perangkat daerah, biro-biro dan Rumah Sakit Daerah.	kegiatan berdasarkan skala Prioritas.
7	Asisten Kelembagaan PD Kabupaten Kupang	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/21 /BO1.2, tanggal 20 Maret 2025, Hal : Rekomendasi Kelembagaan PD Kabupaten Kupang	Lokasi sekolah yang jauh dari jangkauan internet sehingga internet tidak stabil	Melakukan pemetaan penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja baik itu dimulai dari informasi jabatan, perhitungan beban kerja dan pemetaan kelas jabatan untuk seluruh jabatan Daerah;
8	Asistensi Kelembagaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kupang	Surat Gubernur NTT, Nomor: 000.8.5/39/BO1.2, Tanggal 28 Mei 2025, Hal : Rekomendasi Susunan Organisasi PD Kabupaten Kupang	Kurangnya pemahaman dan komitmen operator dalam Anjab ABK	Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada
9	Asistensi Kelembagaan UPTD Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua, Kelas A	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/20/BO1.2, Tanggal 20 Maret 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan UPTD Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua		Melakukan pendampingan Anjab dan ABK melalui daring atau media on line

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
10	Asistensi Kelembagaan UPTD RS Pratama Solor Kabupaten Flores Timur	Asistensi Kelembagaan UPTD RS Pratama Solor Kabupaten Flores Timur		Menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat menindaklanjuti menghubungi pihak sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan Anjab ABK
11	Asistensi Kelembagaan Penyesuaian Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tipe A menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Tipe A	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/43/BO1.2, tanggal 10 Juni 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Sumba Barat		
12	Asistensi Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, Kelas A	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/49/BO1.2, tanggal 16 Juni 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rote Ndao		
13	Asistensi Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/50/BO1.2, tanggal 16 Juni 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Perlindungan Anak Kabupaten Mangarai Barat	Mangarai Barat		
14	Asistensi Kelembagaan UPT Balai Besar Produksi Garam di Kupang	Surat Gubernur Nomor : 0008.5/56/BO 1.2, Hal : Dukungan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Produksi Garam di Kupang.	Membutuhkan waktu untuk jadwal asistensi dan keluarnya rekomendasi gubernur karena penyesuaian dengan jadwal kegiatan Gubernur dan Wagub.	Di sampaikan pada Perangkat daerah terkait tentang jadwal Pimpinan.
15	Asistensi Kelembagaan UPTD Puskesmas Weri Lolo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya	Surat Gubernur Nomor : 0008.5/58/BO 1.2, tanggal 16 juli 2025, Hal Rekomendasi Kelembagaan Puskesmas Weri Lolo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya	kegiatan asistensi akan di laksanakan jika dokumen yang di sampaikan oleh PD Kab/Kota untuk kegiatan di maksud telah lengkap	Rekomendasi Gubernur yang di keluarkan di sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan kab/kota
16	Asistensi Kelembagaan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Flores Timur	Surat Gubernur Nomor : 0008.5/59/BO 1.2, tanggal 23 juli 2025, Hal Rekomendasi Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur	kegiatan asistensi akan di laksanakan jika dokumen yang di sampaikan oleh PD Kab/Kota untuk kegiatan di maksud telah lengkap	Rekomendasi Gubernur yang di keluarkan di sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan kab/kota
17	Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Mangarai Timur	Surat Gubernur Nomor : 0008.5/71/BO 1.2, tanggal 26 Agustus 2025, Hal Rekomendasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Mangarai Timur	kegiatan asistensi akan di laksanakan jika dokumen yang di sampaikan oleh PD Kab/Kota untuk kegiatan di maksud telah lengkap	Rekomendasi Gubernur yang di keluarkan di sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan kab/kota
18	Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Alor	Surat Gubernur Nomor : 0008.5/78/BO 1.2, tanggal 18 September 2025, Hal Rekomendasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Alor	kegiatan asistensi akan di laksanakan jika dokumen yang di sampaikan oleh PD Kab/Kota untuk kegiatan di maksud telah lengkap	Rekomendasi Gubernur yang di keluarkan di sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan kab/kota
19	Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya	Surat Gubernur Nomor : 0008.5/81/BO 1.2, tanggal 26 September 2025, Hal Rekomendasi	kegiatan asistensi akan di laksanakan jika dokumen yang di sampaikan oleh PD Kab/Kota untuk	Rekomendasi Gubernur yang di keluarkan di sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
20	Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi Kelembagaan di Kemendagri di Jakarta tanggal 17 s/d 19 sep 2025 (Rp. 16.508.521.-)	Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor Surat Tugas 900/35/BO 1.1 dan 900/36/BO 1.1 tanggal 16 September 2025	kegiatan di maksud telah lengkap	kab/kota
21	Kegiatan Lembur dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota se NTT (Rp 7.320.000.-).	1. Rekomendasi kelembagaan PD Kab Alor 2. Rekomendasi kelembagaan kab. Sumba Barat daya	Kegiatan lembur terkait rekomendasi untuk Penataan Kelembagaan PD Kab/Kota berdasarkan usulan kab/kota sehingga tidak bisa di laksanakan sekaligus.	Jumlah hari kegiatan lembur berdasarkan jumlah usulan kab/kota
B.	Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja			
	1. Melakukan Koordinasi Percepatan Hasil Validasi Evaluasi Jabatan Pelaksana pada KemenPAN dan RB	Persetujuan Kelas Jabatan Pelaksana dari Kemen PAN RB kepada Pemerintah Provinsi NTT	Perubahan regulasi tentang nomenklatur jabatan pelaksana mengakibatkan penyesuaian harus dilakukan beberapa kali.	Mekakukan koordinasi dengan PIC Provinsi NTT pada KemenPANRB yang menangani Evaluasi Jabatan.
	2. Melakukan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Menunggu Rekomendasi Persetujuan Hasil Validasi Evaluasi Jabatan dari KemenPANRB.	Mekakukan koordinasi berkelanjutan dengan PIC Provinsi NTT pada KemenPANRB tentang Rekomendasi Persetujuan Hasil Validasi Evaluasi Jabatan dari KemenPANRB
	3. Melakukan Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB	Hasil Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SPF (SMA, SMK dan SLB) Pada 22 Kabupaten /kota Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalamApikasi SINJAB	Keterbatasan mengakibatkan pelaksanaan di beberapa Kabupaten harus dilaksanakan skala prioritas. Tidak semua Kabupaten dilakukan pendampingan.	Melakukan pendampingan baik secara tatap muka dan daring melalui zoom meeting dan Whatsaap Grup.

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,			
4.	Penerbitan Rekomendasi hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja untuk seluruh Perangkat Daerah	Rekomendasi untuk Triwulan I hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja perangkat daerah dan Form D pada Aplikasi TPP Pemerintah Provinsi NTT	Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan rekomendasi tepat waktu.	Melakukan koordinasi Penerbitan Rekomendasi hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja untuk seluruh Perangkat Daerah
5.	Melakukan Pengumpulan Data Pemetaan Kelas Jabatan untuk Seluruh Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Peta Jabatan Seluruh Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Penambahan CPNS dan PPK yang menyebabkan perubahan komposisi Bezzeting ASN.	Melakukan penyesuaian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan Perangkat Daerah.
6.	Melakukan Penyesuaian Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan bagi Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Konsep Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	Perubahan Regulasi dan Proses Pelantikan atau Pengukuhan yang belum dilakukan sehingga Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT belum disampaikan ke Biro Hukum.	Menyiapkan Konsep Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sehingga jika sudah dilakukan pelantikan dan pengukuhan maka sudah bisa ditetapkan.
7.	Validasi hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Hasil validasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Aplikasi SINJAB dilakukan pada 509 SPF yang telah melakukan penginputan dalam	Kurangnya pemahaman dan komitmen kepala sekolah dan operator dalam menyusun Anjab ABK dan Lokasi sekolah yang jauh dari jangkauan internet sehingga penyusunan anjab menjadi terhambat.	Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan SPF baik secara tatap muka dan daring melalui zoom meeting dan Whatsaap Grup.

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Timur dalam Aplikasi SINJAB.	SINJAB dan 103 belum melakukan penginputan dalam SINJAB.		
8.	Melakukan Koordinasi Percepatan Hasil Validasi Jabatan Evaluasi Pelaksanaan pada KemenPAN dan RB	Persetujuan Kelas Jabatan Pelaksanaan dari Kemen PAN RB kepada Pemerintah Provinsi NTT	Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Formal (SMA, SMK dan SLB) untuk menyelesaikan Anjab ABK tepat waktu.	Melakukan koordinasi dan pendampingan percepatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Formal (SMA, SMK dan SLB).

II. Bagian Tataaksana

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Renja/DPA 2025

Realisasi sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
A.	Tata Laksana Pemerintahan			
1.	Revisi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Masih terdapat 20 Perangkat Daerah/Biro/RSD yang belum melakukan penyesuaian SOP AP berdasarkan Sistem Kerja dan menyampaikan draft Revisi SOP untuk direview.	Biro Organisasi telah menyampaikan Surat Penegasaan ke IV hal Evaluasi dan revisi SOP AP kepada Perangkat Daerah sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT segera menyampaikan Draft SOP AP

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
				untuk dapat direview dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur,
2.	Penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Ranpergub tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Hasil Penilaian PEKPPP dari KEMENPAN RB dan Penilaian Kepatuhan dari Ombudsman pada 6 OPD sampel Provinsi yaitu Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kesehatan, UPTD Samsat Kota Kupang, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, RSUD Prof. W.Z. Yohannes Kupang terdapat indikator penilaian dengan yang point rendah.	Melakukan koordinasi terakit Hasil Penilaian PEKPPP dari KEMENPAN RB dan Penilaian Kepatuhan dari Ombudsman pada 6 OPD sampel Provinsi yaitu Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kesehatan, UPTD Samsat Kota Kupang, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, RSUD Prof. W.Z. Yohannes Kupang terdapat indikator penilaian dengan yang point rendah
3.	Review SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Catatan Perbaikan SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
			memperoleh nilai 77,85 point dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan nilai 63,92 Pont;	
4.	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Keputusan Gubernur SOP-AP Nomor 262/KEP/HK/2024		
5.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 324/KEP/HK/2024		
6.	Review SOP Biro Umum Setda Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 325/KEP/HK/2024		
7.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 413/KEP/HK/2024		
8.	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 429/KEP/HK/2024		
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 445/KEP/HK/2024		
10.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 34/KEP/HK/2025		
11.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 110/KEP/HK/2025		
12.	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 217/KEP/HK/2025		
13.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP 219/KEP/HK/2025		
14.	Sekretariat DPRD	Kepgub SOP-AP 285/KEP/HK/2025		
15.	Review SOP Dinas Lingkungan Hidup dan	Kepgub SOP-AP 349/KEP/HK/2025		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Kehutanan Provinsi NTT			
16.	Review SOP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Keputusan Gubernur SOP-AP Nomor 347/KEP/HK/2025		
17.	Review SOP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Keputusan Gubernur SOP-AP Nomor 346/KEP/HK/2025		
18.	Review SOP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk		
19.	Review SOP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
20.	Review SOP Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
21.	Review SOP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT		
22.	Review SOP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
23.	Review SOP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
24.	Review SOP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	NTT			
	25. Review SOP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
	26. Review SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Catatan Perbaikan SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
	27. Review SOP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		
	28. Review SOP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		
	29. Review SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
	30. Review SOP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
	31. Review SOP Dinas Peternakan Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Dinas Peternakan Provinsi NTT		
	32. Review SOP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
	33. Review SOP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT		
	34. Review SOP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	NTT			
	35. Review SOP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT		
	36. Review SOP Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
	37. Review SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
	38. Review SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
	39. Review SOP Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
	40. Review SOP Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
	41. Review SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
	42. Review SOP Badan Penghubung Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Badan Penghubung Provinsi NTT		
	43. Review SOP Sosial Provinsi NTT	Belum menyampaikan Draft hasil Desk Dinas Sosial Provinsi NTT		
	44. Review SOP RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang	Belum menyampaikan Draft hasil Desk RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang IT		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	45. Review SOP RS Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	Belum menyampaikan Draft hasil Desk RS Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang		
B	Pelayanan Publik			
	1. Penyusunan SK Tim KOIN-YANLIK;	Tersedianya SK Tim KOIN-YANLIK		
	2. Evaluasi hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI;	Tertaksananya Evaluasi Pelayanan Publik Melalui Metode Observasi Lapangan dan Perangkat daera (Dinas Sosial, RSUD Prof. W.Z.Yohanes Kupang, UPTD Samsat Kota Kupang di Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP)		
	3. Evaluasi hasil Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KEMENPAN RB;	Tertaksananya Evaluasi PEKPPP Melalui Metode Observasi Lapangan pada PD (DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, dan RSUD Prof. W.Z.Yohanes)		
	4. Pembentukan Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Keputusan Gubernur NTT Nomor. 138/KEP/HK/2025 tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025		
	5. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara	Keputusan Gubernur NTT Nomor. 158/KEP/HK/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025		
6.	Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Keputusan Gubernur NTT Nomor: 171/KEP/HK/2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025		
7.	Merevisi Quisioner Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Usulan Quisioner Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 ke KEMENPAN RB		
8.	Pendampingan dan Persiapan Top 10 KOIN YANLIK Tahun 2024 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2025;	11 inovasi dari Pemerintah Provinsi NTT dinyatakan lolos seleksi administrasi dan 2 inovasi dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor: B/174/PP.00.05/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi KIPP Tahun 2025.		
9.	Penilaian Mandiri Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Prov. NTT Tahun 2025	Tetaksananya Penilaian Mandiri Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Prov. NTT Tahun 2025 Melalui Metode Observasi Lapangan dan Pengisian F01 dan		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
		Penyebaran F03 oleh 12(dua belas) Perangkat Daerah pada antara lain : Dinas Sosial, RSUD Prof. W.Z.Yohanes Kupang, UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT, Dinas Kesehatan, DPMPTSP,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPSDMD, Dinas PMD, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DP3AP2KB		
	10. Pendampingan Penilaian Mandiri Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Prov. NTT Tahun 2025 oleh Kemenpan RB RI	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Mandiri Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Prov. NTT Tahun 2025 oleh Kemenpan RB RI terhadap 2 (dua) Unit Layanan Publik pada RSUD W. Z. Yohannes Kupang dan Dinas Sosial dengan metode observasi lapangan, Pengisian F01, F04 dan Penyebaran F03 ke Masyarakat		
	11.Rapat Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Inkubasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan Innovation Government Award (IGA) (Koin-Yanlik Berdas) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur,	Terlaksananya Rapat Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Inkubasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan Innovation Government Award (IGA) (Koin-Yanlik Berdas) Tingkat Provinsi		
	12.Penyusunan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur	Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur Nusa tenggara Timur Tahun 2025 tentang Pembentukan		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Inkubasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan Innovation Government Award (IGA) (Koin-Yanlik Berdas) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Pelaksana dan Tim Inkubasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan Innovation Government Award (IGA) (Koin-Yanlik Berdas) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	13. Penyusunan Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan Innovation Government Award (IGA) (Koin-Yanlik Berdas) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tersusunnya Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan Innovation Government Award (IGA) (Koin-Yanlik Berdas) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	14. Penyusunan draft Laporan Penilaian Mandiri Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Prov. NTT Tahun 2025	Tersusunnya draft Laporan Penilaian Mandiri Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Prov. NTT Tahun 2025		
	15. Penyusunan Draft Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tersusunnya Draft Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur		

III. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Renja/DPA 2025

Realisasi sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

No.	Kegiatan	Hasil	Pemmasalahan	Solusi
A. Reformasi Birokrasi				
1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ende	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Ende	Belum tersusunnya Roadmap Nasional sehingga belum ada penyesuaian RB Tematik dengan Roadmap RB Nasional	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB mengenai penyesuaian RB tematik yang harus sesuai dengan RoadMap RB Nasional
2.	Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Pemerintah Provinsi Tahun 2024.	Terlaksananya Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Pemerintah Provinsi Tahun 2024	Belum dilaksanakan kegiatan budaya kerja	Pelaksanaan Budaya Kerja akan dilaksanakan pada semester II
3.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Lembata	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Lembata	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi NTT belum mencapai target RPJMD. Hal ini disebabkan karena terdapat catatan yang harus diperbaiki dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan selanjutnya (RPJMD, IKU, LKIP)	Melakukan koordinasi mengenai penyusunan dengan RoadMap Kementerian PAN dan RB
4.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Ngada	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Ngada	Masih banyak PD yang belum membuat cascading sasaran kinerja	Melakukan reviu berbagai dokumen perencanaan agar terjadi keselarasan
5.	Lembur Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik Dan General	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik dan General	Dalam pengisian dan persiapan data-data dukung untuk LKE masih banyak PD yang belum memahami disebabkan karena dalam pengisian data dalam LKE orang yang bersangkutan sudah pindah atau	Melakukan desk penyusunan cascading

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
			diganti dengan pegawai lain yang belum memahami tentang pengisian LKE/data-data yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja kepala PD	
6.	Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumba Barat Daya	Tertaksananya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Sumba Barat Daya	Indeks RB di Kabupaten Sumba Barat Daya masih rendah dan berada di kategori C	Melakukan pembinaan melalui koordinasi penyusunan Road Map RB Kabupaten Sumba Barat Daya
7.	Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Malaka	Tertaksananya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Malaka	Indeks RB di Kabupaten Malaka masih rendah dan berada di kategori C	Melakukan pembinaan melalui koordinasi penyusunan Road Map RB Kabupaten Malaka
8.	Melakukan lembur penginputan pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan RB dalam Portal RB Nasional Tahun 2025	Tertaksananya proses penginputan rencana aksi RB General ke dalam portal RB Nasional	Masih terdapat PD Pengampu RB General yang belum menyusun rencana Aksi RB General	Mekakukan koordinasi rencana Aksi bersama PD pengampu RB General
B	Akuntabilitas Kinerja			
1.	Menyusun LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024.	Tersusunnya dokumen LKIP Pemprov NTT Tahun 2024		
2.	Menyusun PK Gubernur NTT Tahun 2025	Tersusunnya dokumen PK Gubernur 2025		
3.	Memfasilitasi penyusunan LKIP, Tahun 2024, PK dan Rencana Aksi PD lingkup Pemprov NTT Tahun 2025	Tersusunnya dokumen LKIP, PK dan Rencana Aksi PD.		
4.	Melakukan Fasilitas Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten Sikka dan Sumba Tengah	Tertaksananya fasilitasi dan pembinaan saki di Kabupaten, Sikka dan Sumba Tengah		
5.	Melakukan konsultasi penyusunan LAKIP di	Tertaksananya Kegiatan Konsultasi		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Kementerian PAN dan RB di Kementerian PANRB di Jakarta			
6.	Memfasilitasi penyusunan Cascading PD	Tersusunnya Cascading PD		
7.	Melakukan Penilaian Kinerja Kepala PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Tertaksananya kegiatan Penilaian Kinerja PD Tahun 2024 LKE https://bit.ly/BUKTIIDUKUNG_AKIP		
8.	Melakukan Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasi Penilaian Sakip di Kementerian PAN RB di Jakarta	Tertaksananya Konsultasi Penilaian Kinerja di Kementerian PAN RB di Jakarta	Masih banyak catatan temuan evaluasi SAKIP Pemprov NTT Tahap I yang belum ditindaklanjuti	Melakukan koordinasi dengan PD terkait dan Tim SAKIP untuk menindaklanjuti catatan temuan evaluasi SAKIP yang ditulis oleh Kemenpan RB
9.	Melakukan rapat bersama tim evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi NTT	Tertaksananya pembagian Tim dalam rangka evaluasi SAKIP PD	Terbatasnya pengetahuan tim dalam rangka melakukan evaluasi SAKIP	Melakukan PKS evaluasi SAKIP
10.	Melakukan desk bersama evaluator AKIP PD dalam rangka Evaluasi AKIP	Terbangunnya pemahaman dalam mengisi LKE dan Bukti Dukung	Banyak evaluator yang baru yang belum memahami cara pengisian LKE dan Bukti dukung	Melakukan bimtek bagi evaluator AKIP PD
11.	Melakukan Fasilitasi Dan Pembinaan Sakip di Kabupaten Sumba Barat Daya	Tertaksananya Fasilitasi Sakip di Kabupaten Sumba Barat Daya	Masih banyak catatan temuan evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB yang belum ditindaklanjuti	Melakukan koordinasi dengan Pemkab SBD untuk menindaklanjuti catatan temuan dari Kemenpan RB
12.	Melakukan Fasilitasi Dan Pembinaan Sakip di Kabupaten Ende	Tertaksananya Fasilitasi Sakip di Kabupaten Ende	Pemkab Ende belum membuat RATL catatan evaluasi SAKIP tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025	Melakukan koordinasi dengan Pemkab Ende untuk menindaklanjuti catatan temuan dari Kemenpan RB
13.	Melakukan Fasilitasi Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten TTS	Tertaksananya Fasilitasi Sakip di Kabupaten TTS	Kurangnya kerjasama yang baik dari E dengan Bagian Organisasi tentang Indikator yang masih makro kalau Bap Mau menambahkan Indikator2 Makro t	Kabupaten TTS Dalam Evaluasi SAKIP di Kemenpan sudah mendapat Predikat Baik

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
			Tanpa mengurangi Indikator ² yang sudah Kirim oleh Biro Organisasi dan Tambahan Tambahan tersebut bias masuk ke IKU Daerah.	dari sebelumnya, kedepannya lebih ditingkatkan dan lebih baik lagi maka, perlu perhatian dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTT untuk bisa membimbing Kabupaten TTS agar ke depannya lebih baik lagi.
14.	Melakukan Fasilitas Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten TTU	Tertaksananya Fasilitas Sakip di Kabupaten TTU	Kordinasi antara Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya SAKIP, serta kurangnya respon dari Perangkat Daerah terhadap SAKIP mereka menganggap kalau SAKIP menjadi beban dan yang paling utama adalah keterbatasan anggaran.	Perlu adanya pendampingan Perangkat Daerah yang lebih intensif agar dapat menaikkan Indeks SAKIP Tahun 2025.
15.	Melakukan Fasilitas Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten Alor	Tertaksananya Fasilitas Sakip di Kabupaten Alor	Dalam Implementasi SAKIP Banyak Perangkat Daerah telah Menyusun dokumen untuk diunggah ke e-Sakip Revu tetapi tidak dilakukan dengan alasan lupa Password dan User.	Perlu adanya pendampingan dari Bagian Organisasi sehingga bisa menyelesaikan semua akar permasalahannya.
16.	Melakukan Fasilitas Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten Sumba Barat Daya	Tertaksananya Fasilitas Sakip di Kabupaten Sumba Barat Daya	Dalam Implementasi Sakip Kabupaten Sumba Barat Daya terbatas pegawai disebabkan karena mutasi pegawai yang dilakukan sehingga pemahaman terhadap penyusunan Sakip. terbatas, kurangnya respon dari Perangkat Daerah terhadap Sakip	Perlu adanya pendampingan dari Bagian Organisasi ke Perangkat Daerah untuk memberikan materi atau bimtek ke Perangkat Daerah.
17.	Tertaksananya Fasilitas Sakip di Kabupaten Ngada	Tertaksananya Fasilitas Sakip di Kabupaten Ngada	Koordinasi antar PD dengan Bagian Organisasi berjalan bagus namun ada terdapat terjadi perbedaan pemahaman tentang SAKIP dengan	Perlu ada forum untuk berdiskusi tentang SAKIP yang melibatkan Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat

No.	Kegiatan	Hasil	Pemmasalahan	Solusi
			Bapperda	Perlu ada forum untuk berdiskusi tentang SAKIP yang melibatkan Bagian Organisasi, Bapperda dan Inspektorat
18.	Tertaksananya Fasilitas Sakip di Kabupaten Manggarai	Tertaksananya Fasilitas Sakip di Kabupaten Manggarai	Koordinasi antar PD dengan Bagian Organisasi berjalan bagus namun ada terkadang terjadi perbedaan pemahaman tentang SAKIP dengan Bapperda	
19.	Melakukan Verifikasi LKE AKIP PD	LKE SKIP PD diverifikasi	Ada beberapa bukti dukung yang tidak sesuai dengan pilihan jawaban	Bimtek/pelatihan evaluator AKIP PD bagi
20.	Melakukan lembar dalam rangka evaluasi SAKIP	LKE SAKIP diverifikasi	Ada beberapa bukti dukung yang tidak sesuai dengan pilihan jawaban	Bimtek/pelatihan evaluator AKIP PD bagi
21.	Menyusun Nota Dinas dari Asisten Administrasi Umum selaku Ketua Tim evaluasi SAKIP kepada Plh Aekretans Daerah	Laporan evaluasi SAKIP tersedia		

3.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 dan realisasi sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	582.249.897,00	432.983.014,00	74,36
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.769.697,00	171.822.900,00	80,00
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	18.343.000,00	17.572.950,00	95,80
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.315.700,00	25.207.200	92,28
1.3.	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	169.110.997,00	129.042.750,00	76,30
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.037.800,00	150.410.026,00	65,95
2.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.183.300,00	33.901.250,00	84,36
2.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00
2.3.	Penyediaan Bahan/Material	40.451.500,00	33.988.981,00	84,02
2.4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	35.964.000,00	32.501.355,00	90,37
2.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.039.000,00	48.218.440,00	44,22
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	34.200,00	-	-
3.1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
3.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	34.200,00	-	-
4.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan	63.460.400,00	47.055.000,00	74,14

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Pemerintahan Daerah			
4.1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.000.400,00	4.000.000,00	99,99
4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	3.780.000,00	2.835.000,00	75,00
4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.680.000,00	40.220.000,00	72,23
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.947.800,00	48.695.088,00	87,03
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.592.800,00	22.340.488,00	84,00
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.355.000,00	26.354.600,00	89,77
6.	Fasilitas Keprotokolan	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
6.1	Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
II	Program Penataan Organisasi	1.088.570.202,00	605.958.254,00	55,66
1.	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	472.825.800,00	221.514.211,00	46,84
1.1.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	259.211.500,00	66.301.111,00	25,57
1.2.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.281.000,00	6.065.000,00	27,22
1.3	Penataan Analisis Jabatan	191.333.300,00	149.148.100,00	77,95
2.	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	615.744.402,00	384.444.043,00	62,43
2.1.	Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	92.458.504,00	69.000.472,00	74,62
2.2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	223.629.700,00	171.511.571,00	79,69
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	5.600.000,00	-	-
2.4.	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	141.583.198,00	93.702.000,00	66,18
2.5.	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	152.473.000,00	50.230.000,00	32,94

3.5. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI			FORMULA INDIKATOR
				AWAL 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	
1.	2	3	4	5	6	7	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tataaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	45,45	51,51	NA	Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" $\frac{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kemandirian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional	45	47	35,88	Kemampuan Organisasi Daerah $\frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR
				2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
			prosedur; e. pendidikan dan pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko; i. pengukuran kinerja; j. pengembangan inovasi layanan; dan k. budaya organisasi.				
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	2,85 (cukup)	3,1 (Baik)		Total Nilai 6 Komponen Standar Pelayanan x 0,75 + Hasil Penilaian Masyarakat melalui F03 x 0,25
		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan	15,15	30,30	100	$\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI			FORMULA INDIKATOR
				AWAL 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
			kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintahan).				
		Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur.	12	18,00	51.28	Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan) Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT Jumlah PD yang X 100%

PENUTUP

Laporan Triwulan III merupakan Pertanggungjawaban pelaksanaan Program, Kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Januari sampai dengan September 2025. yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atau pelaksanaan sasaran suatu organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Laporan Triwulan III diharapkan menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja berikutnya maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah :

- a. Peningkatan pemahaman pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- b. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan skala Prioritas;
- c. Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada;
- d. Perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- e. Melakukan koordinasi mengenai penyusunan *roadmap* dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f. Melakukan reviu berbagai dokumen perencanaan agar terjadi keselarasan;
- g. Melakukan desk penyusunan Cascading Kinerja.

Kupang, Oktober 2025

2/ Kepala Biro Organisasi 



Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197103291999031002